PERLINDUNGAN SOSIAL DALAM PSETK

DITJEN BINA BANGDA
Kementerian Dalam Negeri
Jl. Taman Makam Pahlawan No. 20 Kalibata, Jakarta Selatan

MATERI POKOK

- Pertimbangan Aspek Lingkungan dan Sosial Dalam IPDMIP
- Hierarki Penanggulangan Dampak Lingkungan dan Sosial
- Profil/Data Awal Lingkungan, Sosial dan Masyarakat Adat

Pertimbangan Aspek Lingkungan dan Sosial Dalam IPDMIP

Pelaksanaan program IPDMIP harus memperhatikan pengamanan sosial dan lingkungan yang memiliki sasaran, yaitu;

- Meningkatkan **kesadaran masyarakat** untuk turut mencegah, menghindari dan meminimalkan dampak negatif terhadap kondisi sosial dan lingkungan dari rehabilitasi dan peningkatan irigasi yang akan dilaksanakan.
- Meningkatkan **kesadaran dan komitmen seluruh pelaku (perangkat pemerintah, kelompok peduli, konsultan dan fasilitator)** terhadap pentingnya pengamanan sosial dan lingkungan dalam setiap tahapan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di masyarakat.

PSETK

PSETK menyediakan data atau informasi mengenai kondisi **sosial, ekonomi, teknis,** dan **kelembagaan** menuju peningkatan kinerja pengelolaan irigasi-pertanian partisipatif dan berwawasan lingkungan.

Prinsip Penanggulangan Dampak Lingkungan dan Sosial

Berdasarkan Permen PUPR NOMOR 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi, Peningkatan jaringan irigasi adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan dan sosial daerah irigasi.

IPDMIP diklasifikasikan dalam kategori B, dan dalam pelaksanaannya prinsip dasar perlindungan lingkungan dan sosial harus menjadi perhatian utama, antara lain:

1) Usulan kegiatan harus menghindari atau meminimalkan dampak lingkungan negatif, dan harus mencari desain dan material alternatif untuk meminimalkan dampak lingkungan negatif.
2) Usulan kegiatan harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan menghindari kawasan lindung yang telah ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3) Setiap usulan kegiatan yang menimbulkan dampak lingkungan harus dilengkapi dengan dokumen lingkungan dan rencana pengelolaan lingkungan.

TUJUAN PENYUSUNAN PSETK DAN PERLINDUNGAN SOSIAL

1. MENGIDENTIFIKASI KONDISI SOSIAL, EKONOMI, BUDAYA DI SETIAP DAERAH IRIGASI
2. MENGIDENTIFIKASI PERMASALAHAN SOSIAL, EKONOMI DAN BUDAYA SEBAGAI BASELINE DALAM MENENTUKAN IDENTIFIKASI POTENSI DAMPAK PENTING DARI RENCANA PROGRAM.
3. SEBAGAI DASAR DALAM MENENTUKAN MITIGASI DAMPAK SOSIAL, EKONOMI, DAN BUDAYA DALAM RENCANA PROGRAM
4. SEBAGAI DASAR DALAM MENENTUKAN PROGRAM PEMULIHAN MATA PENCAHARIAN YANG DIPERLUKAN KHUSUSNYA BAGI KELOMPOK RENTAN DAN WARGA TERKENA DAMPAK PARAH
5. SEBAGAI DASAR DALAM MENENTUKAN MEKANISME PENANGANAN KELUHAN SECARA TEPAT DARI RENCANA PROGRAM.

DATA PSETK YANG DIPERLUKAN DALAM PERLINDUNGAN SOSIAL

1. HUBUNGAN SOSIAL

a) **MENGETAHUI TINGKAT KERJASAMA PETANI DALAM MEMBANGUN SALURAN IRIGASI SECARA SWADAYA**. DATA INI DIGUNAKAN APABILA PROGRAM IPDMIP MASUK, TINGKAT KESADARAN /TINGKAT PARTISIPASI PETANI AKAN PENTINGNYA SALURAN IRIGASI SUDAH TERIDENTIFIKASI.

b) **MENGETAHUI TINGKAT KERJASAMA DAN TINGKAT PERSELISIHAN YANG TERJADI DIANTARA PARA PETANI**. DATA INI DIGUNAKAN APABILA TINGKAT KERJASAMA TINGGI, MAKA PROGRAM IPDMIP DAPAT TERLAKSANA SECARA CEPAT. NAMUN BILA TINGKAT PERSELISIHAN TINGGI, MAKA PERLU DILAKUKAN PENANGANAN SOSIAL TERLEBIH DAHULU SEBELUM PROGRAM IPDMIP DILAKSANAKAN.

DATA PSETK YANG DIPERLUKAN DALAM PERLINDUNGAN SOSIAL

2. TINGKAT PENGETAHUAN PETANI

a) **MENGETAHUI PENGETAHUAN PETANI TERHADAP PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN SALURAN IRIGASI**

b) **MENGETAHUI PROGRAM PELATIHAN (CAPACITY BUILDING) YANG DIPERLUKAN KELOMPOK TANI, APABILA TINGKAT PENGETAHUAN PETANI MASIH RENDAH TERHADAP PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN SALURAN IRIGASI.**

c) **MENGETAHUI TINGKAT PENGETAHUAN PETANI TERHADAP KEMUNGKINAN ADANYA DAMPAK SOSIAL DARI RENCANA PROGRAM DAN PENANGANAN DAMPAK SOSIAL YANG DIPERLUKAN, APABILA RENCANA PROGRAM MENIMBULKAN DAMPAK SOSIAL SIGNIFIKAN TERHADAP KEBERADAAN PETANI.**

d) **MENGETAHUI APAKAH DIPERLUKAN UNIT KHUSUS PENANGANAN DAMPAK SOSIAL DI TINGKAT PETANI.**

DATA PSETK YANG DIPERLUKAN DALAM PERLINDUNGAN SOSIAL

3. PENGADAAN TANAH

a) MENGETAHUI KESEDIAAN PETANI APABILA DIPERLUKAN SUMBANGAN TANAH SECARA SUKARELA, JIKA TERJADI PENGADAAN TANAH UNTUK REHABILITASI/PEMBANGUNAN IRIGASI

b) MENGETAHUI APAKAH PARA PETANI MEMBUTUHKAN GANTI KERUGIAN/KOMPENSASI JIKA ADA KEGIATAN PENGADAAN TANAH (MENCAKUP TANAH, BANGUNAN, TANAMAN)

c) MENGETAHUI KEINGINAN PETANI UNTUK PEMBAYARAN GANTI KERUGIAN UNTUK TANAH APAKAH BERDASARKAN HARGA PASAR YANG BERLAKU

d) MENGETAHUI BENTUK-BENTUK GANTI KERUGIAN YANG DIPERLUKAN PETANI (UANG TUNAI, TANAH PENGGANTI, PERMUKIMAN KEMBALI)

DATA PSETK YANG DIPERLUKAN DALAM PERLINDUNGAN SOSIAL

3. PENGADAAN TANAH

e) MENGETAHUI PELAKSANAAN KEGIATAN MUSYAWARAH DALAM MENENTUKAN BESAR DAN BENTUK GANTI KERUGIAN

f) MENGETAHUI PENANGANAN YANG DAPAT DILAKSANAKAN APABILA TERJADI PERMASALAHAN SOSIAL SEPUTAR PENGADAAN TANAH

g) MENGETAHUI APAKAH DIPERLUKAN KEGIATAN KONSULTASI DALAM PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH

DATA PSETK YANG DIPERLUKAN DALAM PERLINDUNGAN SOSIAL

4. PENGELOLAAN SALURAN/SEMPADAN IRIGASI

a) MENGETAHUI KEBERADAAN ORANG YANG TINGGAL DI SEPANJANG SALURAN/SEMPADAN IRIGASI

b) MENGETAHUI TINGKAT SWADAYA PETANI DALAM PENGELOLAAN SALURAN/SEMPADAN IRIGASI

c) MENGETAHUI KEMUNGKINAN ORANG YANG TINGGAL DI SEMPADAN SALURAN IRIGASI DAPAT DIRELOKASI KE WILAYAH LAIN

d) MENGETAHUI ORANG YANG TINGGAL DI SEMPADAN SALURAN IRIGASI MENDAPAT IZIN DARI BALAI WILAYAH SUNGAI.

e) MENGETAHUI UNTUK ORANG YANG SECARA ILLEGAL TINGGAL DI SEMPADAN IRIGASI APAKAH HARUS MENDAPAT UANG SANTUNAN UNTUK BIAYA PINDAH KE LOKASI LAIN.

DATA PSETK YANG DIPERLUKAN DALAM PERLINDUNGAN SOSIAL

7. MASYARAKAT ADAT

a) MENGETAHUI KEBERADAAN MASYARAKAT ADAT DI LOKASI DIMANA RENCANA PROGRAM AKAN DILAKSANAKAN

b) MENGETAHUI GAMBARAN KONDISI MASYARAKAT ADAT DILIHAT DARI: TANAH HAK ADAT DAN SUMBER DAYA ALAM, MATA PENCAHARIAN DAN INTEGRITAS BUDAYA, BUDAYA DAN INTEGRITAS KOMUNAL, KESEHATAN MASYARAKAT ADAT, PENGETAHUAN MASYARAKAT ADAT DAN LEMBAGA ADAT.

Jenis Kegiatan serta Potensi Dampak Sosial dan Langkah Tindakan Mitigasi yang Memungkinkan

No.	Jenis Kegiatan/Data PSETK	Potensi Dampak Sosial	Langkah-langkah tindakan mitigasi, instrument pengamanan sosial dan instrumen mitigasi yang memungkinkan
1	Kegiatan Pengadaan Tanah	1) Jika ada kegiatan pengadaan tanah, akan menimbulkan dampak sementara terhadap produksi hasil pertanian, para penggarap akan kehilangan mata pencaharian, dan terjadinya penurunan pendapatan. 2) Memicu terjadinya potensi konflik sosial antara petani dengan pemrakrsa, apabila tidak terjadi kesepakatan terkait besar dan bentuk ganti kerugian, dan banyaknya petani penggarap yang kehilangan mata pencaharian.	1) Pemrakarsa memasukan Kajian dampak sosial dalam Kajian Dampak Lingkungan dan Sosial UKL-UPL; dan mengembangkan rencana pengelolaan sosial UKL-UPL untuk mengatasi potensi dampak sosial yang teridentifikasi. 2) Terkait isu pengadaan tanah, pemrakarsa dapat memperoleh tanah melalui kesepakatan jual beli (jika tanah yang diperlukan sampai dengan 5 Ha) dan/atau melalui kaidah *eminent domain* (pemerintah berwenang untuk mengambil alih tanah pribadi untuk kepentingan umum), di mana baik UU No. 2/2012 maupun peraturan pelaksanaannya dan SPS ADB 2009 berlaku. 3) Institusi yang membutuhkan tanah memperoleh tanah dengan kaidah *eminent domain* menyusun Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) sesuai dengan UU No. 2 Tahun 2012 dan Perpres 71 Tahun 2012 dan perubahannya. 4) Perlu disusun program pemulihan mata pencaharian (LRP) bagi warga terkategori rentan dan terkena dampak parah

PROFILING ASPEK SOSIAL

A. Masalah Sosial

No.	Uraian Pertanyaan	Jawaban			Penjelasan
		Ya	Tidak	Ragu	
A.1. Hubungan Sosial					
1.	Apakah para petani dapat bekerja sama membangun saluran irigasi secara swadaya ?				
2.	Apakah hubungan sosial diantara para petani masih terjalin baik ?				
3.	Apakah sering terjadi perselisihan di antara petani terkait pemanfaatan saluran irigasi ?				
4.	Jika sering terjadi, frekuensi terjadinya perselisihan lebih dari 2 kali setiap bulan ?				
A.2. Tingkat Pengetahun Petani					
1.	Apakah para petani memiliki pengetahuan yang cukup dalam pemanfaatan dan pengelolaan saluran irigasi ?				
2.	Apakah tingkat pengetahuan para petani masih				

2.	Apakah tingkat pengetahuan para petani masih perlu ditingkatkan dalam pemanfaatan dan pengelolaan saluran irigasi ?				
3.	Jika diperlukan, apakah dalam bentuk pelatihan ?				
4.	Apakah rencana proyek dapat menimbulkan dampak sosial bagi masyarakat khususnya petani ?				
4.	Jika ya, apakah diperlukan program pelatihan penanganan dampak sosial khusus bagi petani ?				
5.	Apakah di tingkat kelompok petani diperlukan unit khusus penanganan dampak sosial ?				
A.3. Pengadaan Tanah					
1.	Jika diperlukan lahan untuk pembangunan saluran irigasi, apakah para petani dapat memberikan sumbangan lahan secara sukarela?				
2.	Jika diperlukan lahan untuk pembangunan saluran irigasi, apakah para petani perlu mendapat ganti kerugian untuk lahan ?				
3.	Jika diperlukan ganti kerugian untuk lahan, apakah harganya harus sesuai harga pasar?				

No.	Uraian Pertanyaan	Jawaban			Penjelasan
		Ya	Tidak	Ragu	
4.	Jika diperlukan ganti kerugian, biasanya dalam bentuk:				
	a. Uang Tungai				
	b. Tanah Pengganti				
	c. Permukiman kembali				
5.	Apakah besar dan bentuk ganti kerugian perlu dimusyawarahkan dengan petani ?				
6.	Jika terdapat bangunan dan atau tanaman di atas lahan yang akan dibebaskan, apakah perlu diganti rugi ?				
7.	Jika terjadi permasalahan dengan pengadaan lahan, apakah para petani akan menyampaikannya ke ketua kelompok ?				
8.	Apakah untuk pengadaan lahan, perlu dilakukan kegiatan konsultasi dengan para petani ?				

A.4. Pengelolaan Saluran Irigasi					
1	Apakah masih banyak orang yang tinggal di sepanjang sempadan irigasi ?				
2	Untu pengelolaan saluran irigasi apakah dapat dilakukan secara swadaya oleh petani ?				
3	Apakah orang yang tinggal di sempadan saluran irigasi dapat direlokasi ke lokasi lain?				
4	Apakah orang yang tinggal di sempadan saluran irigasi mendapat izin dari balai wilayah sungai ?				
5	Untuk orang yang secara illegal tinggal di sempadan irigasi apakah harus mendapat uang santunan untuk biaya pindah ke lokasi lain ?				
6	Jika terdapat bangunan dan atau tanaman di sepanjang sempadan irigasi apakah harus diberikan ganti kerugian ?				
A.5. Relokasi/Permukiman Kembali					
1	Jika ada penduduk yang harus pindah ke lokasi lain karena lahannya akan digunakan untuk pembangunan saluran irigasi, apakah akan pindah secara mandiri/swadaya ?				

2	Jika perlu relokasi secara mandiri, apakah diperlukan bantuan untuk pindah ke lokasi baru ?				
3	Apakah diperlukan tunjangan hidup selama masa transisi di lokasi baru ?				
4	Apakah diperlukan jaminan hak kepemilikan tanah jika pindah ke lokasi baru ?				
A.6.	**Program Pemulihan Mata Pencaharian**				
1	Apakah produktifitas hasil usaha tani mengalami peningkatan satu tahun terakhir ini ?				
2	Jika saluran irigasi direhabilitasi, apakah dapat meningkatkatkan produktifitas hasil usaha tani ?				
3	Apakah rehabilitasi saluran irigasi akan meningkatkan pendapatan/ekonomi keluarga petani ?				
4	Jika ada lahan yang harus dibebaskan untuk pembangunan saluran irigasi apakah akan menurunkan pendapatan/ekonomi keluarga ?				
5	Jika ada tanaman tumbuhdiatas lahan yang akan dibebaskan, apakah akan menurunkan pendapatan/ekonomi keluarga ?				

No.	Uraian Pertanyaan	Jawaban			Penjelasan
		Ya	Tidak	Ragu	
6	Jika terjadi penurunan pendapatan/ekonomi keluarga akibat adanya pengadaan lahan, apakah diperlukan program pemulihan mata pencaharian ?				
7	Jika diperlukan program pemulihan mata pencaharian, apakah bentuk programnya dapat berupa pelatihan ?				
8	Apakah para petani mata pencahariannya tidak akan berubah, jika harus pindah ke lokasi lain karena lahannya dibebaskan ?				
9	Apakah terdapat potensi sumber daya alam baru yang dapat dijadikan peluang usaha baru bagi petani jika harus pindah ke lokasi lain ?				
10	Jika ada, apakah diperlukan pelatihan khusus untuk menjalankan usaha baru tersebut?				

PROFILING MASYARAKAT ADAT

No.	Uraian Pertanyaan	Jawaban			Penjelasan
		Ya	Tidak	Ragu	
A.7.	**Keberadaan Masyarakat Adat**				
1	Apakah di wilayah saluran irigasi terdapat masyarakat adat ?				Jika ada masyarakat adat, sebutkan nama kelembagaan masyarakat adat, serta jumlah masyarakat adat (KK/Jiwa)
2	Jika terdapat masyarakat adat, apakah kondisi terkait masyarakat adat di bawah ini masih terpelihara dengan baik ?				
	a. Tanah Hak Adat dan Sumber Daya Alam				
	b. Mata Pencaharian dan Integritas Budaya				
	c. Budaya dan Integritas Komunal				
	d. Kesehatan masyarakat adat				
	e. Pengetahuan Masyarakat Adat dan Lembaga Adat				

PENANGANAN KELUHAN

No.	Uraian Pertanyaan	Jawaban			Penjelasan
		Ya	Tidak	Ragu	
A.8.	**Penanganan Keluhan**				
1	Jika terdapat permasalahan terkait pelaksanaan program rehabilitasi irigasi, apakah keluhan dapat disampaikan secara langsung ke pihak BBWS/BWS?				
2	Jika tidak, apakah salurannya dapat melalui pihak-pihak berikut ini:				
	a. Ketua kelompok petani				
	b. Ketua RT/RW				
	c. Kepala Desa				
	d. Kecamatan				
	e. Bupati				
3	Jika terjadi keluhan dari para petani, apakah selalu tercatat secara khusus oleh kelompok?				
4	Apabila terjadi keluhan di masyarakat, apakah keluhan selalu dapat dipecahkan atau diberikan solusi jalan keluarnya oleh pihak-pihak berikut:				
	a. Ketua kelompok petani				
	b. Ketua RT/RW				
	c. Kepala Desa				
	d. Kecamatan				
	e. Bupati				
	f. BBWS/BWS				